

Djalan Keluar

dari

Krisis Ekonomi

oleh: Ir. Sakirman

Jajasan "Pemberuan"

24

Djalan Keluar **dari** **Krisis Ekonomi**

oleh: **Ir. Sakirman**

*(Pidato diutjapkan dalam sidang pleno
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
pada tanggal 16 Desember 1953)*

**PERHIMPUNAN
DOKUMENTASI
INDONESIA**

**NAALDWIJKSTRAAT 36
1059 GH AMSTERDAM**

Jajasan „Pembaruan”

Djakarta 1954

Saudara Ketua, saya selaku Ketua fraksi pada malam ini akan memberikan pemandangan setjara umum tentang Nota Keuangan dan Laporan Devisen.

Adapun soal-soal yang berkenaan dengan pekerjaan dari Kementerian masing-masing sepanjang itu ditetapkan didalam Nota Keuangan akan dibentangkan oleh kawan-kawan lainnja dari fraksi kami.

I

Sifat Setengah-Kolonial Anggaran Belandja 1952 — 1953

Saudara Ketua, dalam Nota Keuangan 1950 — 1951 halaman 7 Mr. Sjafruddin, Menteri Keuangan dalam pemerintahan Republik Indonesia Serikat, menjatakan pendiriannya terhadap penjusunan anggaran belandja 1950. Antara lain diterangkannya bahwa selama menunggu pensahan anggaran tahun 1950, semua pengeluaran harus didasarkan pada kredit-kredit yang bersesuaian dan yang telah ditetapkan dalam tahun 1949.

Pendirian Sjafruddin ini didasarkan pada pasal-pasal dalam "Wet op de Staatsinrichting van Indonesië" yang menetapkan bahwa selama anggaran sesuatu tahun belum disahkan, maka dipakai sebagai dasar pemeliharaan keuangan, anggaran tahun yang mendahului tahun dinas yang bersangkutan.

Pendirian Sjafruddin ini membawa akibat: bahwa politik anggaran belandja tahun 1950 dan djuga tahun 1951 dari Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia berpokok pada politik anggaran belandja kolonial tahun 1949 dari pemerintah federal Van Mook.

Dari sini dapat kita lihat bahwa Republik Indonesia Serikat yang kemudian mendjelma mendjadi Republik

Indonesia kesatuan yang menurut perdjandjian Konperensi Medja Bundar telah menerima apa yang dinamakan "kedaulatan yang penuh dan tidak bersyarat" itu, ditinjau dari sudut politik anggaran belandja, adalah tidak lain daripada suatu negara setengah-kolonial.

Sebagaimana kita lihat pada anggaran belandja th. 1949, maka beberapa tjorak yang khusus bagi anggaran kolonial atau setengah-kolonial nampak dengan djelas pada anggaran tahun 1950 — 1951, jaitu :

- (1) sebagian besar dari pendapatan negara diperoleh dari hasil pemungutan pajak-pajak ;
- (2) sebagian besar dari pendapatan ini dipergunakan untuk keperluan administrasi Pemerintah sipil, untuk keperluan ketentaraan, kepulisian, pendjara dan pengadilan ;
- (3) sebagian dari pendapatan negara dipakai untuk membayar pindjaman dari luarnegeri beserta dengan bunganya ;
- (4) hanya sebagian yang sangat ketjil sadja dari pendapatan negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan materiil dan kulturil dari Rakjat kita ;
- (5) tempat-tempat yang penting dalam lapangan keuangan dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan2 dan bank2 modal asing ;
- (6) adanya defisit atau kekurangan anggaran belandja yang menimbulkan tekanan-tekanan inflasi yang luarbiasa ;
- (7) tekanan-tekanan deflasi sebagai akibat daripada politik massa ontslag semakin meluaskan pengangguran dan kemiskinan.

Apakah yang dipakai sebagai dasar oleh Dr. Sumitro, bekas Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo, utk. menjusun anggaran belandja tahun 1952 dan tahun 1953 ?

Meskipun bagi Sumitro terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk menetapkan prinsip-prinsip baru jg. demokratis dlm. menjusun anggaran 1952, — 1953, tetapi menurut kenjataanja budget politik dan kebi-

djaksanaan moneter yang dilakukan oleh Sumitro pada hakekatnja adalah landjutan semata-mata daripada politik anggaran belandja Sjafruddin-Wibisono. Dalam Nota Keuangan Negara 1952 — 1953 Menteri Sumitro dulu mentjoba menutupi kenjataan ini dengan keterangan yang pandjang-lebar, tetapi yang lebih bersifat demagogis daripada wetenschappelijk.

1. Tentang Pendapatan Negara

Marilah kita kupas lebih landjut kelemahan-kelemahan daripada anggaran 1952 — 1953 untuk membuktikan bahwa anggaran ini pada hakekatnja masih djuga bertjorak setengah-kolonial dan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan tjorak ini mendjadi tjorak yang nasional.

Pendapatan negara tahun 1952 dan tahun 1953 sebagian besar diperoleh dari hasil pemungutan pajak-pajak langsung atau tidak langsung dan hanya sebagian ketjil sadja berupa keuntungan perusahaan negara.

Menurut perkiraan tahun 1952, djumlah pendapatan negara seluruhnja adalah sebesar Rp. 9.178.860.000.—, terdiri dari Rp. 6.636.875.000.— atau 72% dari pendapatan negara, berupa panghasilan pajak ; Rp. 2.248.947.000.— atau 24,5% dari pendapatan negara, berupa ber-bagai2 penerimaan ; Rp. 293.038.000.— atau $\pm 3,5\%$ dari pendapatan negara berupa keuntungan perusahaan-perusahaan Pemerintah.

Perkiraan sementara tahun 1953 memberikan angka2 sebagai berikut :

Seluruh pendapatan negara berdjumlah	Rp. 7.580.269.400.—
Penghasilan dari pajak-pajak atau sama dengan $\pm 73\%$	„ 5.555.243.000.—
Berbagai-bagai penerimaan atau sama dengan 24,5 %	„ 1.830.098.000.—
Keuntungan Perusahaan Peme-	

rintah atau 2,5% dari seluruh
pendapatan negara „ 194.928.400.—

Dari angka-angka diatas djelaslah bahwa sebagian besar daripada pendapatan negara didapat dari pajak-pajak sedangkan hanja sebagian ketjil sadja diperoleh dari keuntungan perusahaan Pemerintah.

Hasil pemungutan pajak untuk tahun 1952 dan tahun 1953 masing-masing bukan hanja berdjumlah 72 % dan 73 %, tetapi lebih banjak daripada itu. Sebab dalam halaman IV/22 dapat kita lihat bahwa apa jang dinamakan berbagai-bagai penerimaan itu buat sebagian besarnja terdiri dari hasil kotor sertifikat devisen tahun 1952 sebesar Rp.2.070.000.000.— atau lebih dari 90% dari djumlah seluruhnja rupa-rupa pendapatan dan dari indusemen sebesar Rp. 1.649.969.000.— atau kurang lebih 90% dari djumlah rupa-rupa pendapatan tahun 1953. Ini berarti bahwa djumlah daripada pendapatan jang didapat dari pajak2 merupakan suatu djumlah jang lebih besar daripada 70% dan dapat ditaksir tidak kurang dari 95% dari seluruh pendapatan negara, karena baik hasil sertifikat devisen maupun indusemen adalah pada hakekatnja tidak lain dari pajak tidak langsung.

Selandjutnja dapat kita lihat dari daftar VIII B, bahwa pendapatan-pendapatan jang didapat dari pajak2 peralihan, perseroan, pendjualan, bea masuk, bea keluar umum, bea keluar tambahan, tjukai tembakau dan lain-lain adalah pendapatan-pendapatan jang masing-masing djumlahnja lebih dari Rp. 500.000.000.—. Ini berarti bahwa djustru pajak-pajak jang langsung atau tidak langsung mendjadi beban Rakjat banjak memainkan rol jang sangat besar dalam penerimaan negara.

Djadi lebih dari 90% daripada pendapatan negara diperoleh dari hasil pemungutan pajak-pajak Rakjat banjak dan hanja sebagian ketjil sadja berupa keuntungan perusahaan-perusahaan Pemerintah.

2. Tentang Pengeluaran Negara

Sifat setengah-kolonial dari anggaran belandja tahun 1952 dan tahun 1953 dapat kita lihat dengan djelas pada pengeluaran negara jang digambarkan dalam daftar X daftar XI dan daftar XIII.

Menurut daftar XI, maka djumlah pengeluaran berulang netto dalam th. 1952 adalah
Rp. 11.845.335.380.—.

Dari djumlah ini Rp. 7.239.481.000.— atau 61,1% dipergunakan untuk apa jang dinamakan sektor keamanan jang meliputi sektor-sektor pertahanan, kepulisian, kehakiman dan dalam negeri Rp.2.104.699.100.— atau 17,8% dipergunakan untuk keperluan sektor kemakmuran jang meliputi sektor-sektor perekonomian, pertanian, dinas perbelandjaan, perhubungan pelajaran dan pekerdjaan umum dan tenaga, sedangkan 8,3% dipergunakan untuk keperluan kebudayaan jang meliputi sektor-sektor penerangan, pendidikan, pengadjaran dan hanja 3,7% disediakan untuk keperluan sosial jaitu perburuhan, kesehatan, urusan pegawai, dan djaminan sosial.

Djumlah pengeluaran berulang-ulang netto dalam tahun 1953 adalah Rp. 8.105.806.325.— dan dari djumlah ini Rp. 5.430.352.000.— atau 67% disediakan untuk sektor keamanan; Rp. 924.477.725.— atau 11,4% untuk kemakmuran; Rp. 347.348.750.— atau 4,3% untuk keperluan sosial.

Kalau kita bandingkan angka2 tahun 1952 dengan tahun 1953, dapatlah kita ambil kesimpulan sbb. :

- (a) meskipun pengeluaran tahun 1953 untuk keperluan sektor keamanan miendjadi kurang dibandingkan dengan djumlah pengeluaran jang bersangkutan tahun 1952, tetapi dalam perbandingan persentase, pengeluaran tahun 1952 adalah lebih besar jaitu 67% tahun 1953 dibandingkan dengan 61% tahun 1952;

- (b) disamping itu kita lihat bahwa pengeluaran untuk keperluan kemakmuran tahun 1952 sebesar Rp. 2.104.699.100.— atau 17,8% dari jumlah pengeluaran tahun itu, turun dalam tahun 1953 menjadi Rp. 924.477.725.— atau 11,4% dari jumlah pengeluaran 1953;
- (c) pengeluaran untuk keperluan kebudayaan tahun 1952 sebesar Rp. 893.947.300.— turun menjadi Rp. 858.644.100.— tahun 1953 sedangkan
- (d) pengeluaran untuk keperluan sosial tahun 1952 sebesar Rp. 96.675.500.— turun menjadi Rp. 88.741.500.— tahun 1953.

Djadi djelaslah bahwa politik pengeluaran berulang-ulang tahun 1953 adalah pada hakekatnja tidak berbeda dibandingkan dengan politik tahun 1952 jaitu bahwa sebagian besar daripada pengeluaran-pengeluaran itu dipergunakan untuk keperluan sektor keamanan jaitu pertahanan, kepulisian, kehakiman dan dalamnegeri, sedangkan hanya sebagian ketjil s saja dipergunakan untuk keperluan kemakmuran Rakjat, kebudayaan dan sosial. Malahan seperti diterangkan diatas pengeluaran untuk sektor keamanan tahun 1953 merupakan 67% dari seluruh jumlah pengeluaran berulang-ulang tahun ini.

Disamping pengeluaran-pengeluaran yang bersifat berulang-ulang maka Menteri Sumitro menjediakan djuga pengeluaran modal meskipun djumlahnja sangat sedikit jaitu Rp. 2.898.775.100.— tahun 1952 dan Rp. 1.657.673.600.— tahun 1953 atau sesudah dikurangi dengan penerimaan modal yang bersangkutan masing-masing menjadi Rp. 1.602.482.400.— dan Rp. 1.210.436.200.—.

Kalau kita peladjar daftar XIII yang menggambarkan sesuatu perangkaan pengeluaran-pengeluaran modal maka mungkin akan timbul kesan seakan-akan politik pengeluaran modal tahun 1953 adalah lebih maju daripada politik yang didjalankan tahun 1952, terutama djika kita hanya melihat kepada angka-angka persentase saja. Sebab menurut angka-angka persentase ini, penge-

luaran modal tahun 1952 untuk keperluan perusahaan, kepulisian, kehakiman dan dalamnegeri sebesar 23,2% dari seluruh pengeluaran modal netto turun menjadi 17,8% sedangkan pengeluaran modal untuk keperluan kemakmuran naik dari 64,3% dalam tahun 1952 menjadi 76% dalam tahun 1953.

Kenaikan persentase angka-angka ini hanya bersifat relatif dan pada hakekatnja tidak mempunyai arti apa-apa, malahan sebaliknya dapat kita tarik kesimpulan bahwa politik pengeluaran modal tahun 1953 adalah kurang maju dibandingkan dengan politik tahun 1952. Sebab jumlah pengeluaran modal bruto seluruhnja dalam tahun 1952 adalah Rp. 2.898.775.100.— dan kurang menjadi Rp. 1.657.673.600.— dalam tahun 1953, sedangkan untuk keperluan kemakmuran tahun 1952 dan tahun 1953 dipergunakan masing-masing Rp. 2.326.815.200.— dan Rp. 1.365.990.100.—.

Sebagaimana nanti akan kami terangkan lebih lanjut, maka politik pengeluaran modal yang dilakukan oleh Sumitro baik dalam tahun 1952 maupun dalam th. 1953 adalah berdasarkan kepada suatu teori kapitalis yang reaksioner, yang sudah tidak pada tempatnja lagi didjalankan di Indonesia.

Mendjalankan politik pengeluaran modal seperti yang diandjurkan dan buat sebagian telah didjalankan oleh Sumitro di Indonesia tidak bisa berarti lain daripada mendjalankan suatu politik mempertahankan sistim ekonomi yang agraris dan setengah-kolonial dan menutup kemungkinan-kemungkinan mengadakan persiapan-persiapan industrialisasi dengan membangun industri nasional yang dapat menghasilkan barang-barang kebutuhan Rakjat.

3. Tentang Defisit Anggaran Belandja

Masaalah defisit anggaran belandja tidak dapat ditinjau setjara formil dari angka-angka tentang besarketjilnja defisit itu semata-mata. Ia adalah suatu masaa-

lah jang sepenuhnya ditentukan oleh sistim ekonomi dan keuangan dan dengan sendirinja oleh politik anggaran belandja jang dijalankan oleh pemerintah sesuatu negara.

Meskipun setjara formil menurut angka-angka jang disadjikan dalam Nota Keuangan, defisit tahun 1953 adalah djauh lebih kurang daripada defisit tahun 1952, ini tidak berarti bahwa keadaan ekonomi dan keuangan di Indonesia sudah mendjadi djauh lebih baik daripada keadaan tahun 1952. Begitulah, sebagaimana kita alami keadaan tahun 1951 tidak lebih baik daripada keadaan th. 1950, meskipun anggaran belandja th. 1951 tidak menunjukkan defisit, tetapi sebaliknya malahan menunjukkan suatu surplus sebesar Rp. 1.195.000.000.—.

Apakah sebabnja defisit tahun 1952 sebesar Rp. 4.327.000.000.— mendjadi kurang dalam th. 1953 sampai Rp. 1.794.000.000.— ?

Menteri Sumitro mengatakan bahwa berkurangnja defisit anggaran tahun 1953 dengan suatu djumlah jang tidak kurang besarnja dari Rp.3,5 miljard akan membawa akibat melunakkan tekanan-tekanan inflasi dalam tahun 1953.

Meskipun harus diakui bahwa bahaya inflasi memang mendjadi kurang untuk sementara, tetapi kalau kita lihat bagaimana tjara Sumitro mengurangi defisit itu, maka teranglah bahwa usaha mengurangi defisit itu ketjuali membawa akibat melunakkan tekanan-tekanan inflasi djuga membawa akibat semakin kurangnja tenaga pembeli Rakjat, termasuk golongan bekas tenaga pedjuang dan massa tentara jang menerima sokongan maupun gadji dari Pemerintah c.s. Kementerian Pertahanan. Sebab sebagaimana kita lihat dalam daftar-daftar X, XI, XII dan XIII, maka berkurangnja defisit itu disebabkan karena berkurangnja pengeluaran berulang-ulang netto dan pengeluaran modal dalam semua sektor, jaitu sektor keamanan, sektor kemakmuran, kebudayaan dan sosial.

Lagi pula kemungkinan berkurangnja tekanan-tekan-

an inflasi itu membawa akibat mendjadi kurangnja persediaan devisen negara, oleh karena menurut keterangan Sumitro defisit tahun 1953 sebesar Rp.1.794 miljard buat sebagian besar jaitu djumlah Rp. 1.300.000.000.— akan ditutup dengan setjara tidak langsung dengan menggeserkan kekurangan djumlah Rp. 1.300.000.000.— itu kepada kekurangan pembayaran dengan luarnegeri. Dan ini berarti bahwa persediaan devisen negara menurut rentjana Sumitro selama tahun 1953 akan berkurang dengan Rp. 1.300.000.000.—.

Para ahli ekonomi kapitalis memang sangat ketakutan akan angka-angka jang menggambarkan kekurangan anggaran belandja dan mentjoba untuk melenjakkan angka-angka ini dengan djalan jang merugikan negara dan Rakjat.

Sebetulnja masaalah "defisit" itu, meskipun untuk sementara memang bisa membawa akibat jang buruk terhadap keadaan ekonomi dan keuangan negara, tetapi pengalaman dinegeri-negeri jang telah dapat membebaskan diri dari kekuasaan ekonomi imperialis, menunjukkan bahwa "defisit" jang dialami untuk satu atau dua tahun merupakan suatu djembatan untuk menudju keadaan jang lebih baik. Asal sadja defisit itu timbul sebagai akibat daripada investasi modal setjara besar-besaran dan menurut rentjana jang ditentukan.

II

Krisis Ekonomi dan Keuangan di Indonesia jang Semakin Mendalam

1. Sepintas lalu tentang keadaan Ekonomi dan Keuangan Internasional

Dalam Nota Keuangan, Dr. Sumitro mentjoba mengupas keadaan ekonomi dan keuangan internasional dan akhirnya mengambil kesimpulan dlm. halaman III/15 bahwa "dengan tetap berlangsungnja perimbangan-

perimbangan pada pasar dunia seperti sekarang ini, maka tidak dapat dihindarkan akan adanya kekurangan-kekurangan lagi dalam anggaran belandja tahun 1953".

Dari seorang jang menamakan diri "ahli keuangan" dan seorang pentolan soska dilapangan keuangan, orang sesungguhnya mengharapkan akan kupasan setjara kapitalis jang lebih lengkap dan mendalam mengenai perimbangan-perimbangan dalam pasardunia sekarang. Tetapi apa jang telah dikupas setjara sepintas lalu oleh Dr. Sumitro itu bukanlah keadaan sewadjaranja daripada pasardunia sekarang dan hanya sekedar merupakan pemberitahuan bahwa harga-harga barang-barang mentah "dipasardunia" atau lebih tepat dikatakan disebagian pasardunia, menjadi merosot dan setjara mekanis. Dr. Sumitro lalu mengambil kesimpulan bahwa selama keadaan tidak berubah, adanya suatu defisit lagi dalam anggaran belandja tahun 1953 tidak dapat dihindari.

Karena dalam pemetjahan masaalah ekonomi dan keuangan dalam negeri, adanya suatu pengetahuan jang tepat tentang perimbangan-perimbangan jang sewadjaranja dalam pasardunia sekarang adalah sangat penting, maka baiklah kita bahas lebih dulu keadaan ekonomi dan keuangan internasional pada waktu ini.

Perang dunia II jang direntjanakan oleh kaum imperialis dan jang ditimbulkan oleh negeri-negeri fasis Djerman dan Itali di Eropa dan oleh Djepang di Asia, terbukti tidak berachir dengan hasil-hasil sebagaimana diharapkan oleh negara-negara imperialis Amerika-Inggris-Perantjis maupun oleh negara-negara fasis Djerman-Itali-Djepang.

Negeri-negeri fasis telah hantjur selama perang dunia II dan negeri-negeri imperialis terutama Inggris dan Perantjis menjadi bankrut karena sangat banyak menderita kerusakan-kerusakan dan kerugian-kerugian. Hanya imperialis Amerika sadjalah jang muntjul sebagai satu-satunya negara imperialis jang masih kuat.

Disamping kenjataan-kenjataan ini, maka kita lihat

suatu kenjataan lagi jaitu bahwa perang dunia II tidak berakibat semakin menjadi lemahnja apalagi hantjurnja negara sosialis Sovjet Uni, tetapi bahwa sebaliknya malahan berakibat semakin menjadi kuatnja Sovjet Uni dan timbulnja negeri-negeri baru jang dapat membebaskan diri dari kekuasaan modal monopoli asing, jaitu Republik Rakjat Tiongkok, negeri-negeri Demokrasi Rakjat di Eropa Timur, Republik Demokrasi Vietnam dan Republik Rakjat Korea. Dengan demikian kekuatan sosialisme dan demokrasi jang dulu sebelum perang dunia II hanya meliputi seperenam dari dunia ini dengan penduduk kurang lebih 200.000.000, sekarang setelah perang dunia II telah berkembang dan meluas sehingga meliputi daerah jang sangat luas dengan penduduk jang banjaknja lebih dari sepertiga djumlah penduduk dunia.

Djelasnja perang dunia II tidak berachir dengan lahirnja kekuasaan monopoli atas seluruh dunia dari kaum imperialis jang dipelopori oleh Amerika, tetapi sebaliknya dunia telah terpetjah menjadi dua kubu atau front, jaitu: kubu sosialis, demokrasi dan perdamaian jang dipelopori oleh Sovjet Uni dan kubu imperialis jang agresif jang dipelopori oleh Amerika.

Dan dengan petjahnja dunia ini menjadi dua kubu, maka membawa akibat terbaginja pasardunia jang dulu meliputi seluruh dunia, minus Sovjet Uni, menjadi pasardunia jang besar; disatu pihak pasardunia kapitalis jang lama jang selalu menderita krisis, jang sekarang semakin diperketjil dan jang mengandung pertentangan-pertentangan didalamnja dan dipihak lain pasardunia jang baru jang demokratis, stabil dan jang tidak mengenal krisis.

Berlainan dengan watak daripada pasardunia kapitalis jang lapuk dan jang semakin terantjam oleh bahaya krisis, maka pasardunia jang baru tidak mengenal krisis dan kesulitan-kesulitan untuk mendjual pro-

*Hasan dan
Somanalis*

duksinja, karena : pertama bertambahnya produksi tidak didasarkan pada nafsu untuk mentjari untung sebanyak-banyaknya, tapi ditujukan pada memenuhi setjara maksimal kebutuhan materiil dan kulturil dari seluruh Rakjatnja; kedua kekuatan membeli daripada Rakjat karenanja semakin bertambah besar dan ketiga perdagangan diantara negeri-negeri yang berada dalam pasardunia yang demokratis itu dilakukan atas dasar persamaan hak dan atas prinsip saling menguntungkan. Djadi kedua pasardunia itu mempunyai sifat dan arah perkembangan yang bertentangan satu sama lain dan ini adalah suatu kenyataan pokok yang kita lihat dilapangan ekonomi dan keuangan internasional setelah perang dunia II, suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi oleh siapapun djuga, termasuk golongan-golongan yang berkuasa dinegeri-negeri kapitalis, sebagaimana dapat kita batja dalam „Laporan P.B.B. th. 1951 — 1952” yang dimuat dalam „World Economic Report”, United Nations, Department of Economic Affairs, New York 1953. Dr. Sumitro dalam uraiannja hanja membuka mata terhadap pasardunia kapitalis dan menutup matanja serapat-rapatnja terhadap kenyataan-kenyataan tentang adanya pasardunia yang lain seperti diterangkan diatas, dan oleh karenanja tidak melihat perbedaan besar antara perimbangan pasardunia sebelum dan pasardunia sesudah perang dunia II.

Kesimpulan kita : uraian Dr. Sumitro tidak objektif dan oleh karena itu tidak mungkin benar.

2. Politik Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan Luar-negeri yang Reaksioner dari Sjafruddin — Wibisono — Sumitro.

Pengalaman selama tiga tahun ini telah membuktikan bahwa politik luarnegeri pemerintah-pemerintah Indonesia, mulai dari djaman Kabinet Hatta sampai kedja-

man Sumitro dalam Kabinet Wilopo, hanja merugikan ekonomi nasional kita karena politik ini hanja berorientasi pada negara-negara imperialis dan membatasi diri pada mengadakan hubungan-hubungan dengan pasardunia kapitalis yang sempit dan bankrut. Disamping itu kelihatan sekali politik ekonomi, keuangan dan perdagangan luarnegeri Sjafruddin — Wibisono — Sumitro yang berusaha setjara sistimatis mengisolasi Indonesia dari pasardunia yang baru, stabil dan demokratis yang timbul sesudah perang dunia dan yang meliputi negeri-negeri Sovjet Uni, Republik Rakjat Tiongkok dan negeri-negeri Demokrasi Rakjat lainnja.

Dan inilah sebab yang pokok mengapa sudah lama nampak tanda-tanda akan adanya „afglijdingsproses”, seperti yang disinjalir oleh program Kabinet Wilopo satu setengah tahun yang lalu.

Apakah akibat-akibat yang langsung kita alami karena politik yang reaksioner dari Sjafruddin — Wibisono — Sumitro ?

Sebagaimana kita ketahui, maka dalam usahanja untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan daripada sistim kapitalisme, negeri-negeri imperialis terutama Amerika berusaha menimbulkan peperangan dunia baru dengan merubah politik ekonomi dan keuangan yang damai mendjadi politik ekonomi perang, mendirikan pangkalan-pangkalan militer dinegeri-negeri lain dan melakukan agresi terhadap beberapa negeri lainnja.

Dengan melalui organisasi-organisasi yang sekarang ini boleh dikata dikuasai sepenuhnya atau sebagian oleh imperialis Amerika, seperti PBB, GATT, IMF, IBRAD, ECA, TCA dan perdjandjian-perdjandjian militer seperti NATO dan ANZUS yang telah dikuasai sepenuhnya oleh Amerika. Amerika mentjoba menguasai keadaan ekonomi dan keuangan dan achirnja keadaan politik negara-negara lain yang mendjadi anggota atau menerima bantuan dengan melalui organisasi-organisasi tersebut.

Terhadap Indonesia, sebagai negara yang menjalankan apa yang dinamakan "politik bebas dan aktif" dan belum pernah menyatakan terang-terangan memihak sepenuhnya kepada Amerika, dijalankan politik ekonomi dan keuangan yang bersifat perang sebagai berikut:

- (a) dibawah kedok „bantuan” teknik dan ekonomi Amerika telah dapat mengirimkan agen-agen atau mata-matanya ke Indonesia;
- (b) dengan menggunakan Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai alat politik, maka Amerika telah memaksakan Indonesia supaya menjalankan embargo terhadap Republik Rakyat Tiongkok dan dengan demikian melarang Indonesia menjalankan perdagangan yang normal dengan Republik Rakyat Tiongkok;
- (c) dengan memaksa Indonesia supaya menjalankan politik embargo terhadap Republik Rakyat Tiongkok itu Amerika bermaksud menjadikan diri sebagai single buyer dalam beberapa bahan strategis, terutama karet dan timah;
- (d) dengan melalui GATT, Amerika dapat menentukan menurut kehendaknya sendiri rendah dan tingginya bea keluar dan bea masuk sehingga dengan demikian Amerika dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan dengan harga semurah-murahnya, menolak atau mengurangi masuknya barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh Amerika dan menjual barang-barang keluarnegeri dengan harga yang semahal-mahalnya.

Tidaklah mengherankan bahwa negeri-negeri imperialis Eropa Barat yang pada permulaannya sangat gembara menerima apa yang dinamakan "bantuan" dari Amerika, sekarang sesudah mereka mengalami praktek daripada politik luarnegeri Amerika mulai mendjerit dan berteriak supaya "politik membantu" dari Amerika diganti dengan "politik menjalankan perdagangan yang normal" berdasarkan prinsip persamaan dan saling

menguntungkan. Sembojan "trade but not aid", sekarang sudahlah menjadi sembojan kaum politisi burdjuis dinegeri-negeri imperialis dalam gerakan menentang politik luarnegeri Amerika.

Djuga politik "bantuan" Amerika terhadap Indonesia yang mula-mula diharapkan oleh sebagian kaum politisi Indonesia akan dapat memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan lapangan ekonomi dan keuangan, sekarang terbukti membawa akibat-akibat yang sebaliknya daripada apa yang mereka harapkan.

Disamping kerugian-kerugian yang berdjumlah beratus-ratus djuta rupiah yang diderita oleh Indonesia sebagai akibat turunnya harga karet dan timah, maka berkurangnya export bahan-bahan mentah ke-negeri2 kapitalis, termasuk djuga Amerika, akan sangat mempengaruhi neraca pembayaran luarnegeri Indonesia, kearah turunnya nilai-tukar rupiah kita terhadap valuta asing, ketjuali djika Indonesia dapat menutup kekurangan pembayaran dengan luarnegeri itu dengan emas atau devisa. Tetapi usaha menutup kekurangan pembayaran ini dengan emas atau devisa, berarti mengurangi sumber daripada alat-pembayaran yang penting daripada negara.

Djalan lain untuk dapat menutup kekurangan pembayaran ialah dengan mengurangi harga import dan ini berarti mengurangi masuknya barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh Rakyat banyak. Dan ini akan membawa akibat naiknya harga barang kebutuhan yang didatangkan dari luarnegeri dan kenaikan harga barang-barang ini sudah tentu akan membawa akibat djuga naiknya harga barang-barang lainnya yang dihasilkan didalamnegeri.

Tindakan-tindakan yang telah dijalankan oleh Sjafruddin, Wibisono dan Sumitro dilapangan ekonomi dan keuangan seperti politik guntinguang; tindakan-tindakan mengadakan sistim devisa lebih dari 40% jaitu 8%

normal ditambah dengan 33,3% berupa sertifikat devisen, tindakan untuk menjalankan apa yang dinamakan "bukti indusemen baru" dalam bulan Maret 1951, pembagian barang-barang dalam golongan dan peraturan golongan-golongan dengan 100%, 200%, tambahan bajaran, setoran 40% yang kemudian dinaikkan menjadi 75% dari harga import, adalah pada hakekatnya merupakan tindakan-tindakan jg. mempunyai latar belakang politik yang lebih djahat, jaitu politik yang tidak berorientasi kepada kepentingan Rakjat dan bangsa Indonesia tetapi kepada kepentingan imperialis berdasarkan prinsip politik ekonomi dan perdagangan perang yang ditetapkan oleh Amerika.

Djadi djelaslah bahwa politik ekonomi, keuangan dan perdagangan luarnegeri yang mengasingkan Indonesia dari pasardunia yang demokratis dan stabil membawa akibat yang sangat luas dan yang sangat merugikan negara dan Rakjat dilapangan ekonomi dan keuangan.

3. Kesulitan-kesulitan yang semakin bertambah besar dilapangan Keuangan dan Ekonomi

Mr. Sjafruddin yang terkenal dengan politik gunting-uangnja yang sangat kedjam itu, belakangan ini dalam "Laporan De Javasche Bank" 1952 — 1953, mulai bertanja-tanja apakah keadaan ekonomi dan keuangan sekarang ini yang ditjerminkan dalam anggaran belandja 1952 — 1953 masih berada dalam batas-batas kemampuan masyarakat Indonesia.

Meskipun djawaban Sjafruddin itu atas pertanjaan-nja sendiri kurang tepat dan banjak mengandung kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan, tetapi bagaimanapun djuga, sekarang sudah menjadi kenyataan bahwa dikalangan kaum politisi yang menurut pengalaman selalu perpegang kepada garis politik yang merugikan Rakjat banjak sudah terpaksa mengakui adanya kenyataan bahwa beban hidup yang harus di-

pikul oleh Rakjat adalah sangat berat dan semakin hari semakin menjadi berat.

Untuk mengetahui sampai dimana besarnya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Rakjat banjak dan kearah mana kesulitan-kesulitan itu akan berkembang sampai kepuntjaknja, maka dapat dipakai sebagai dasar faktor-faktor sebagai berikut :

- (a) berapa pendapatan nasional daripada negara kita;
- (b) peranan daripada Rakjat dalam proses produksi;
- (c) pengaruh keadaan internasional terhadap perkembangan dalam negeri;
- (d) beban yang harus dipikul oleh Rakjat dalam bentuk pindjaman-pindjaman luar dan dalam negeri serta bunganja dan padjak ;
- (e) politik ekonomi dan keuangan yang dijalankan oleh Pemerintah baik keluar maupun kedalam.

Dalam Nota Keuangan, daftar XVI, dapat kita ikuti perkembangan daripada hutang Indonesia semenjak tertjapainja perdjandjian Konperensi Medja Bundar pada akhir tahun 1949.

Djumlah hutang yang dioper Republik Indonesia Serikat dulu dan dari pemerintah federal Van Mook sebagaimana ditetapkan dalam perdjandjian Konperensi Medja Bundar adalah sebesar Rp.3.888.000.000.—, belum termasuk pindjaman peninggalan bekas negara-negara bagian, antara lain pindjaman dari Republik Indonesia yang diproklamirkan tahun 1945.

Hutang sebesar Rp. 3.888.000.000.— pada akhir tahun 1949 itu naik pada akhir tahun 1950 menjadi Rp. 4.054.000.000.— dan kemudian pada akhir tahun 1951, 1952 dan 1953 berturut-turut naik menjadi Rp. 4.462.000.000.—, Rp. 5.360.000.000.— dan Rp. 5.514.000.000.—.

Bertambah besarnya hutang ini disebabkan adanya hutang baru setelah akhir tahun 1949, jaitu pindjaman Republik Indonesia 1950 dalam negeri, pindjaman Nederland, pindjaman Exim Bank dan pindjaman Djepang dulu Scap.

Menurut daftar XVII, maka djumlah daripada bunga dan tjtjilan jang telah dibayar oleh Pemerintah dalam tahun 1952 ialah Rp. 155.610.735.— (bunga) + Rp. 189.755.759.— = Rp. 345.366.494.—.

Djumlah tjtjilan dan bunga jang harus dibayar oleh Pemerintah makin lama akan makin bertambah besar, karena ada beberapa pindjaman jang tjtjilannja baru dimulai setelah achir tahun 1952, misalnja pindjaman ECA jang tjtjilannja dimulai pada tanggal 30 Djuni 1956, pindjaman Exim Bank, tjtjilannja dimulai 1 Maret 1956, pindjaman Nederland, tjtjilannja dimulai 1953 dengan bunga jang semakin bertambah besar.

Dengan demikian djelaslah bahwa omongan banjak orang bahwa, Republik Indonesia—Konperensi Medja Bundar ini semakin tua usianja akan semakin mendjadi kuat dan stabil adalah suatu demagogi belaka jang bertentangan dengan kenyataan.

Menurut kenyataan maka semakin Republik Indonesia—Konperensi Medja Bundar ini tua usianja semakin beratlah kewajibannja untuk membayar hutang beserta dengan bunganja dan ini sudah tentu akan membawa pengaruh jang sangat besar pada perkembangan anggaran belandja kita, pada perkembangan ekonomi dan keuangan. Keadaan jang menjedihkan ini hanja bisa dihindari djika Pemerintah Indonesia suka dan berani mengubah politik ekonomi dan keuangan jang reaksioner dengan politik ekonomi dan keuangan jang demokratis dan progresif.

Lain daripada itu tiap-tiap hutang jang kita terima dari kaum imperialis, menurut pengalaman jang njata mesti diatur dalam perdjandjian-perdjandjian jang merugikan Rakjat banjak dan merusak kepentingan ekonomi nasional kita.

Perdjandjian Konperensi Medja Bundar jang sangat terkutuk itu adalah suatu tjontoh mengenai soal pindjaman luarnegeri, jang mempunjai tudjuan politik jang sangat djahat.

Dan pindjaman jang oleh Indonesia diterima dari Amerika dengan melalui Exim Bank pada hakekatnja bukanlah suatu pindjaman tetapi suatu alat bagi Amerika utk. turut tjampur dalam menentukan pembangunan ekonomi di Indonesia dan untuk menggunakan devisa Republik Indonesia di Amerika dalam djangka waktu jang tertentu untuk kepentingan Amerika sendiri.

Djuga "bantuan" jang diberikan oleh Amerika kepada Indonesia sebesar \$ 4.000.000.— à \$ 5.000.000.—, seperti diterangkan diatas adalah suatu bentuk usaha Amerika untuk memasukkan spion-spionnja ke Indonesia, sedangkan dengan menekan harga karet dan timah Indonesia, Amerika dapat menggaruk keuntungan ratusan djuta rupiah, dan dengan demikian Amerika membikin Indonesia mendjadi lebih melarat dgn. maksud agar Indonesia lebih menggantungkan diri pada Amerika.

Berapakah djumlah pajak-pajak jang telah disetorkan setjara langsung maupun tidak langsung oleh Rakjat kepada Pemerintah selama 4 tahun jang terachir ini ?

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka lebih dari 90 persen dari pendapatan negara diperoleh dari hasil pemungutan pajak-pajak Rakjat.

Menurut Tabel I dalam halaman 27 "Laporan De Javasche Bank" maka djumlah pendapatan negara selama 4 tahun ini ialah :

Tahun 1950	Rp. 4.093.000.000,—
" 1951	" 10.303.000.000,—
" 1952	" 9.179.000.000,—
" 1953	" 7.580.000.000,—
Djumlah	Rp. 31.155.000.000,—

Kalau kita misalkan; djumlah penduduk Indonesia 75.000.000, maka selama 4 tahun itu setiap orang rata-rata telah membayar pajak 0,9 x Rp.31.155.000.000,— : 75.000.000 = kl. Rp.380.— atau Rp.95.— setiap tahun-

nja. Ini adalah suatu djumlah jang sangat besar apabila kita mengingat bahwa sebagian besar dari Rakjat Indonesia terdiri dari kaum buruh dan tani miskin jg. selama perang dunia II dan selama revolusi telah banyak menngorbankan hartabenda serta tenaganya.

Mr. Sjafruddin dalam "Laporan De Javasche Bank" tersebut diatas, telah memberikan andjuran supaya djumlah penerimaan negara tidak melebihi 60% dari hasil export. Ini berarti menurut Mr. Sjafruddin bahwa apabila dalam tahun ini dan tahun-tahun jang akan datang hasil export ditaksir sebesar Rp. 8.000 à Rp. 9.000 djuta maka pemungutan pajak tidak boleh melebihi dari Rp.6.000 djuta.

Ada suatu hal jang sengadja dilupakan oleh Mr. Sjafruddin jaitu bahwa hasil export tidak seluruhnja dapat dipakai sebagai ukuran untuk mengukur rendah dan tingginya tingkat hidup Rakjat Indonesia. Sebab sebagaimana kita lihat dalam Tabel 42 "Laporan De Javasche Bank" 1952 — 1953, maka djumlah export seluruhnja dalam tahun 1952 sebesar Rp.10.386.750.000.— termasuk hasil-hasil minjak tanah, terdiri dari dua golongan, jaitu golongan hasil-hasil perusahaan dan perkebunan modal besar asing sebesar Rp6.344.300.000,— dan golongan hasil-hasil perusahaan dan perkebunan Rakjat jaitu sebesar 4 miljard rupiah lebih.

Meskipun menurut Ordonansi devisen tahun 1940 Pemerintah mempunyai hak untuk menguasai seluruh hasil devisen tetapi dalam kenjataannya hak Pemerintah ini tidak mempunyai arti ekonomis jang penting oleh karena kemungkinan transfer keuntungan keluarnegeri tetap terdjamin dan sebagian besar daripada devisen dipergunakan oleh importir-importir modal monopoli asing.

Dengan demikian mungkin sekali terdjadi bahwa pada suatu ketika djumlah hasil export adalah besar tetapi sebagian besar keuntungan dari hasil export itu ditransfer keluarnegeri sehingga angka-angka itu sama

sekali tidak dapat didjadikan dasar untuk mengatakan bahwa kemakmuran Rakjat telah bertambah.

Djadi sudah terang bahwa besar dan ketjilnja djumlah pajak-pajak jang dapat kita pungut tidak dapat ditetapkan berdasarkan hasil-hasil export jang buat sebagian besar dikuasai oleh modal monopoli asing. Djumlah pajak-pajak jang dapat kita pungut dapat kita dasarkan kepada pendapatan nasional jang njata dari Rakjat banyak, kaum buruh, kaum tani, pengusaha ketjil, kaum intelektuil dan kaum pengusaha nasional dan bukan pendapatan „nasional” dari perusahaan² perkebunan, pertambangan dan bank-bank modal monopoli asing.

Keadaan ekonomi dan keuangan jang sangat sulit dan jang sudah mentjapai puntjaknja ini semakin bertambah sulit lagi karena politik luarnegeri. Pemerintah-pemerintah Hatta-Natsir-Sukiman dan politik ekonomi dan keuangan Sjafruddin-Wibisono-Sumitro jang reaksioner dan jang telah memperkuat sifat tergantungnja Indonesia kepada negara-negara imperialis Amerika dan Eropa Barat.

Dan usaha Dr. Sumitro untuk memperbanyak produksi nasional dengan memberikan "injeksi" berupa modal sebesar Rp. 1.647.000.000.— tidak akan dapat merubah keadaan, sebaliknya malahan akan menambah kesulitan-kesulitan dilapangan ekonomi dan keuangan, sebagaimana akan kita uraikan lebih landjut. Seorang jang menderita penyakit malaria tidaklah mungkin bisa mendjadi sembuh karena mendapat suntikan untuk penyakit desenterik umpamanya, menurut konsepsi Dr. Sumitro.

Demikianlah keadaan ekonomi dan kuangan pada waktu ini jang tjukup memberi gambaran tentang banjaknja kesulitan-kesulitan jang kita hadapi jang semakin bertambah hebat. Suatu keadaan jang menunjukkan adanya bahaya inflasi besar-besaran, adanya tanda-tanda meningkatnja harga-harga kebutuhan Rakjat, meluasnja pengangguran dan kemelaratan, suatu

keadaan ekonomi dan keuangan yang terantjam oleh bahaya krisis yang semakin mendalam dan menghebat.

III

Djalan keluar dari kesulitan-kesulitan dilapangan Ekonomi dan Keuangan

Sekarang sampailah kita pada persoalan-persoalan, apakah jalan keluar yang bisa membawa kita dari kesulitan-kesulitan ini?

Dalam Nota Keuangannya, Dr. Sumitro mentjaba memajukan suatu konsepsi tentang tjara-tjara mengatasi atau sekurang-kurangnya mengurangi kesulitan-kesulitan yang sekarang kita alami dilapangan ekonomi dan keuangan.

Meskipun Dr. Sumitro tidak memberikan alasan-alasan yang tjukup djelas mengapa ditetapkan djumlah Rp.1.657.000.000.— sebagai djumlah yang paling tepat untuk investasi dalam tahun 1953 tetapi kemudian ternyata bahwa djumlah ini ditetapkan berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh apa yang dikatakan golongan tenaga „ahli” dari PBB (batja Amerika). Menurut golongan „ahli” dari PBB ini maka djumlah investasi yang seharusnya ditetapkan oleh sesuatu negara yang terbelakang dan yang tiap-tiap tahunnya mendapat tambahan penduduk 1 persen, adalah kl. 2 sampai 5 persen dari „pendapatan nasional”.

Berdasarkan prinsip yang diandjurkan oleh golongan „ahli” dari PBB itu, maka Sumitro menetapkan bahwa suatu djumlah 3 à 7,5% dari „pendapatan nasional” untuk Indonesia adalah yang paling tepat pada tingkatan sekarang ini.

„Pendapatan nasional” ditaksir oleh Dr. Sumitro sebesar Rp. 50.000.000.000.— sehingga dengan demikian dapat ditetapkan djumlah pengeluaran modal termasuk financieeringsdienst sebesar Rp. 1.657.000.000.— jaitu kl. 3,3 persen dari Rp. 50.000.000.000.—.

Tidak perlu diterangkan lagi bahwa perhitungan sejara mekanis dan dogmatis dari para „ahli” PBB itu yang rupanja akan dipakai selandjutnja oleh Sumitro untuk memetjahkan masaalah ekonomi dan keuangan adalah keliru samasekali dan djuga sangat memalukan.

Perhitungan sematjam itu mungkin sekali dapat berlaku dinegeri-negeri kapitalis yang telah madju dulu sebelum perang dunia II dan sudah logis bahwa konsepsi itupun hanya akan menguntungkan segolongan ketjil kaum atasan yang berkuasa dinegeri-negeri itu dan tidak menguntungkan Rakjat banjak terutama massa pekerdja dikota-kota dan didesa-desa.

Marilah kita buktikan bahwa djalan yang ditempuh oleh Dr. Sumitro untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dilapangan ekonomi dan keuangan menurut konsepsi para „ahli” PBB yang bankrut itu, dalam tempo dua atau tiga tahun sadja akan membawa Indonesia kedalam djurang kemiskinan dan kemelaratan yang lebih luas dan akan menimbulkan bahaya inflasi besar-besaran yang tidak mungkin dapat diatasi lagi.

Menurut keterangan Dr. Sumitro dalam Nota Keuangannya, maka djumlah devisen pada 1 Djanuari 1952 adalah sebesar Rp. 6.000.000.000 dan pada achir tahun 1952 akan berkurang mendjadi Rp. 4.000.000.000.

Dari djumlah ini sebesar Rp.1.000.000.000 akan dipergunakan sebagai modal usaha guna pembajaran pemasukan barang-barang sedangkan sebagai buffer-stock akan disediakan Rp.750.000.000, sehingga perseediaan devisen yang dapat dipakai sebagai tjandangan untuk „menutup” defisit neratja pembajaran adalah sebesar Rp. 4.000.000.000 — 1.750.000.000. = Rp. 2.250.000.000.—

Menurut apa yang dinamakan „plan tiga tahun” Sumitro, maka djumlah ini akan dipergunakan untuk „menutup” sebagian defisit yang masih dapat dipertanggungjawabkan dalam tahun-tahun 1953, 1954 dan 1955, jaitu Rp. 1.300.000.000.— untuk tahun 1953,

Rp. 600.000.000.— untuk tahun 1954 dan
Rp. 350.000.000.— untuk tahun 1955.

Meskipun belum dapat kita ketahui bagaimana susunan anggaran belandja untuk tahun 1954 dan 1955 itu, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa anggaran belandja untuk tahun-tahun itu akan mengalami kekurangan yang semakin besar, karena pendapatan negara sampai sekarang ini hanya diperoleh dari pemungutan pajak-pajak dan tergantung semata-mata kepada keadaan ekonomi dan perdagangan dengan pasardunia kapitalis yang telah bankrut dan lapuk itu.

Sekarang timbullah pertanyaan, dapatkah kita membenarkan „dalil“ Dr. Sumitro yang diformulasi dalam halaman III/49 Nota Keuangan Negara, yaitu bahwa "dalam keadaan sekarang dengan tjara memasukkan barang-barang dari luarnegeri dgn. djalan memperbesar defisit kita pada neratja pembajaran serta dengan mempergunakan devisa dan tjadangan moneter kita mungkin akan dapat mengimbangi defisit budget yang sepadan?"

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka "dalil" itu mungkin dapat berlaku dinegeri-negeri kapitalis dulu didjaman sebelum perang dunia II.

Tetapi sekarang tidaklah mungkin "dalil" itu dipraktikkan di Indonesia sebagai negara setengah-djadjahan, dimana :

- (a) produksi bahan-bahan export yang sangat kita butuhkan untuk membayar harga import sudah banjak berkurang yaitu turun sampai pada tingkat 60 persen daripada produksi sebelum perang ;
- (b) harga bahan-bahan export yang penting dapat ditetapkan dengan sewenang-wenang oleh kaum radja uang yang berkuasa di Wallstreet dan
- (c) sebagian daripada harga export berupa keuntungan, gadji, dan hasil-hasil export yang dibebaskan dari Ordonansi Devisa tahun 1940, tidak dikuasai oleh Pemerintah.

Dengan demikian bisa terdjadi bahwa karena keadaan-keadaan yang tidak termasuk rentjana Pemerintah (batja Dr. Sumitro) neratja pembajaran menundjukkan defisit yang sangat besar berhubung dengan sangat merosotnja harga export itu.

Djadi djelasnja : dinegeri dimana perdagangan luar dan dalam negeri, seperti di Indonesia, sepenuhnya dikuasai oleh modal monopoli asing, maka kekurangan pembajaran dengan luarnegeri tidak mesti membawa akibat bertambah banjak masuknja barang-barang dari luarnegeri, sehingga dapat melunakkan akibat-akibat moneter terhadap keadaan dalam negeri.

Konsepsi Sumitro itu mengandung bahaya yang sangat besar apabila terdjadi bahwa defisit pembajaran djauh lebih besar djika dibandingkan dengan persediaan devisa yang hendak kita pergunakan untuk menutup defisit itu. Kalau misalnja dalam tahun depan terdapat defisit anggaran dan dengan demikian djuga defisit pembajaran yang lebih besar daripada defisit tahun ini, padahal persediaan devisa untuk tahun depan sebesar Rp. 600.000.000.— adalah djauh lebih kurang daripada djumlah yang disediakan tahun ini, maka keadaan tahun depan akan djauh lebih buruk daripada keadaan tahun ini : tekanan inflasi akan sangat bertambah hebat, sedangkan pada akhir tahun depan persediaan devisa kita tinggal Rp.350 djuta.

Dan bagaimanakah keadaan tahun 1955, apabila kita dengan konsekwensi mendjalankan konsepsi Dr. Sumitro ?

Karena politik perdagangan luar dan dalam negeri dari Sumitro tidak mungkin membawa akibat yg. radikal kearah perbaikan-perbaikan dlm. anggaran belandja, maka sudah dapat dipastikan bahwa anggaran belandja th. 1955 akan menundjukkan djuga defisit yg. besar, sedangkan persediaan devisa kita pada akhir tahun itu sudah habis samasekali. Ini berarti bahwa tidaklah mungkin lagi menutup sebagian daripada defisit th. 1956 dgn. tjara seperti yg. telah kita lakukan

dlm. tahun 1953, 1954 dan 1955. Akibat daripada ini semua ialah bahwa negara kita menjadi bankrut karena sudah kehabisan devisa samasekali sedangkan disamping itu belum dapat ditajapi suatu "way-out" yang dapat menjamin bahwa anggaran belanda tidak akan menundukkan defisit lagi. Dalam keadaan begini menurut Dr. Sumitro, satu-satunya jalan untuk "menutup" kekurangan anggaran ialah dengan memperbanyak persediaan uang kertas atau dengan menjalankan politik penghematan yang lebih tepat dinamakan politik massa-ontslag, sehingga akibatnya tidak bisa lain ketju-ali meluas dan meratannya kemiskinan, kemelaratan serta pengangguran.

Djadi jalan keluar yang ditunjukkan oleh Dr. Sumitro dalam Nota Keuangannya dan yang dibelanjakan dgn. panjang lebar berdasarkan dalil-dalil "ahli" ekonomi kapitalis tidaklah mungkin dapat membawa hasil sebagaimana kita harapkan, sebaliknya "jalan keluarnya" Dr. Sumitro malahan akan membawa negara kita kepada tepi jurang kemiskinan dan kesengsaraan dan inflasi setjara besar-besaran yang tidak dapat kita atasi lagi.

Sudah berkali-kali Pemerintah Ali-Wongsonegoro menerangkan didepan sidang ini, bahwa Pemerintah telah menginsjafi akan djahatnya persetudjuan Konferensi Medja Bundar yang menjebabkan bahwa di Indonesia masih tetap berlaku sistim ekonomi kolonial dan bahwa Pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah sistim ekonomi kolonial ini menjadi sistim ekonomi nasional.

Menurut pendapat Partai Komunis Indonesia, maka salah satu alat yang penting untuk melaksanakan sistim peralihan dari sistim ekonomi kolonial ke sistim ekonomi nasional itu ialah dengan menghilangkan sifat-sifat setengah-kolonial dari anggaran belanda kita. Pokoknya supaya dalam menyusun anggaran belanda lebih diperhatikan kepentingan Rakyat banyak dan ditujukan untuk perbaikan tingkat hidup Rakyat banyak. Sebalik-

nya terhadap modal monopoli asing harus diambil tindakan yang menguntungkan Rakyat dan menguntungkan Republik Indonesia.

Menurut pendapat kami, suatu anggaran belanda negara bukanlah hanya merupakan registrasi semata-mata daripada hutang yang dipinjam oleh Pemerintah kepada luarnegeri dan kepada Rakyat, bukanlah suatu registrasi semata-mata daripada setoran pajak-pajak Rakyat kepada Pemerintah dan juga bukan suatu tata-tatan daripada pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan militer, kepulisian, Pemerintah sipil, kehakiman dan lain-lain, tetapi suatu anggaran belanda seharusnya dijadikan dasar untuk melaksanakan suatu rentjana ekonomi setjara berangsur-angsur, setahun demi setahun, menurut plan yang tertentu.

Marilah kita tinjau lebih lanjut tindakan-tindakan apakah yang perlu ditetapkan dalam anggaran belanda negara Republik Indonesia, untuk merubah sifat setengah-kolonial dari anggaran belanda ini. Tindakan-tindakan itu pada umumnya dapat kita bagi menjadi dua golongan, yaitu tindakan dalam jangka panjang dan tindakan dalam jangka pendek.

Tindakan dalam jangka panjang harus ditujukan untuk membebaskan Indonesia sepenuhnya dari kekuasaan imperialisme dengan jalan menasionalisasi :

- (1) perkebunan asing berteknik modern, pabrik-pabrik besar, termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan ;
- (2) alat-alat perhubungan dan transport seperti kereta api, penerbangan, pos, telegram dan radio, pelajaran dan lain-lain ;
- (3) perusahaan-perusahaan bank dan perusahaan-perusahaan asuransi.

Disamping itu harus pula diambil langkah-langkah yang tegas untuk mempertinggi derajat hidup kaum tani dengan jalan memberikan tanah kepada kaum tani yang tidak bertanah atau yang tidak cukup mempu-

njai tanah dan dengan mempertinggi dan memodernisasi teknik pengairan, dan pertanian.

Untuk menetapkan tindakan-tindakan dalam jangka pendek seharusnya dipakai sebagai dasar (a) kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan dengan situasi politik dalam dan luarnegeri; (b) kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda lagi penyelesaiannya, dan (c) akibat-akibat dilapangan ekonomi dan keuangan negara.

Salah satu tindakan yang sangat tepat dan dapat kami hargai sepenuhnya ialah tindakan dari Pemerintah untuk mengadakan orientasi baru dalam politik perdagangan luarnegeri dengan mengirimkan misi perdagangan ke Republik Rakyat Tiongkok sebagai salah satu usaha untuk berkenalan dan kemudian berhubungan dengan pasardunia yang baru dan demokratis.

Djuga tindakan-tindakan Pemerintah untuk segera membuka kedutaan besar di Moskow dan untuk memperluas perhubungan dagang dengan negeri-negeri Demokrasi Rakyat di Eropa Timur kami sambut dengan gembira dan dengan penuh kepertajaan bahwa lambat laun Pemerintah Indonesia akan melepaskan politik luarnegeri yang reaksioner yang dijalankan oleh Pemerintah-pemerintah Hatta-Natsir-Sukiman.

Tindakan-tindakan Pemerintah yang maju itu hendaknya diikuti dengan tindakan-tindakan lain untuk lebih menjempurnakan dan mengkongkritkan hasil-hasil yang diharapkan dilapangan perekonomian. Sudah waktunya Pemerintah meninjau Ordonansi devisa tahun 1949 dan menggunakan suatu politik pemakaian devisa yang lebih menguntungkan bagi negara dan Rakyat.

Hak yang diberikan oleh peraturan itu kepada Pemerintah untuk dapat menggunakan devisa dari hasil-hasil export pada hakekatnya tidak menguntungkan ekonomi kita, tetapi sebaliknya malahan bisa dipakai oleh kaum modal monopoli asing sebagai kedok untuk menggerowoti kekuasaan Pemerintah dilapangan ekonomi dan

keuangan. Politik pemakaian devisa yang didasarkan pada Ordonansi devisa tahun 1949 itu dalam prakteknya malahan mendorong lahirnya apa yang dinamakan "stroomannen" dan mengakibatkan bahwa Pemerintah semakin lama malahan semakin kekurangan devisa, karena permintaan devisa yang pada hakekatnya ditentukan oleh pengusaha-pengusaha import modal besar asing bisa menjadi lebih banyak daripada persediaannya.

Dengan membatalkan Ordonansi devisa itu maka Pemerintah kemudian dapat menetapkan barang-barang yang mana tidak boleh diimport oleh importir-partikular karena akan diimport oleh Pemerintah sendiri dengan menggunakan devisa hasil export perusahaan-perusahaan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Rakyat. Pemerintah harus membantu sepenuhnya usaha dari kaum exportir dan importir nasional dengan memberikan pimpinan dan kredit setjukupnja, sedangkan kepada kaum importir modal asing untuk sementara diberi kebebasan mengimport barang-barang dengan menggunakan devisa hasil export perusahaan-perusahaan perkebunan-perkebunan, pertambangan dan pertanian modal asing.

Dengan berbagai-bagai jalan Pemerintah harus berusaha menguasai harga barang-barang kebutuhan yang pokok dari Rakyat dan dgn. begini maka lambat laun Pemerintah akan bisa mengambil tindakan untuk menghapuskan perdandjian dengan negeri Belanda mengenai A-Rekening dan dapat mengeliminir pengaruh modal besar dilapangan perdagangan yang vital.

Sebagai tindakan untuk melenjapkan sifat setengah-kolonial anggaran belanda kita perlu dijalankan usaha-usaha untuk memperbanyak produksi makanan dan pakaian dengan menjedikan sebanjak-banyaknya pengeluaran untuk investasi modal dilapangan perindustrian sedang, dan ringan dan pengeluaran-pengeluaran berupa kredit bagi kaum tani dalam jangka pendek.

Dalam anggaran belandja hendaknja ditetapkan pula tindakan-tindakan untuk menasionalisasi beberapa perusahaan yang vital misalnja perusahaan minyak Sumatera Utara dan Tjepu, GIA, KPM dan lain-lain. Djuga harus dilaksanakan rentjana menanami tanah-tanah yang kosong dengan tanaman-tanaman makanan Rakyat atau memberikan tanah itu kepada kaum tani yang tidak bertanah, dan kepada kaum tani yang tidak tjukup mempunyai tanah.

Demikian kami menutup pemandangan umum tentang Nota Keuangan Negara 1952 — 1953 ini dengan pengharapan agar dalam anggaran belandja negara 1954 :

- (a) Pemerintah lebih banyak memperhatikan kebutuhan materiil dan kulturil daripada Rakyat, kaum buruh, tani, pengusaha ketjil, kaum intelektual, peladjar dan pengusaha nasional dengan menjediakan sekurang-kurangnya 60 persen dari seluruh anggaran untuk pos-pos kemakmuran, pertanian, perhubungan, kebudayaan, pendidikan dan peladjaran, sosial, perburuhan dan urusan pegawai.
- (b) Pemerintah mendjalankan politik penanaman modal yang progresif dengan menjediakan modal yang tjukup untuk menasionalisasi beberapa perusahaan yang penting, mendirikan dan memperbanyak hasil perusahaan perindustrian dan keradjinan; memperbanyak hasil-hasil pertanian dengan menanami tanah-tanah yang kosong oleh kaum tani yang tidak bertanah, atau yang tidak tjukup mempunyai tanah;
- (c) Pemerintah mendjalankan politik perekonomian dan keuangan yang maju dengan melandjutkan dan menjempurnakan tindakan-tindakannya dilapangan perdagangan luarnegeri, lapangan pemakaian devisa, pengawasan harga dan setjara berangsur-angsur membebaskan diri dari ikatan-ikatan dan perdjandjian-perdjandjian ekonomi dan keuangan yang merusak ekonomi nasional kita.

Ralat

Baris ke-10 dari bawah pada halaman 13 yang berbunyi: *pasardunia yang besar* ; mestinja diganti menjadi : *dua pasardunia yang besar*

Rp. 1.50

Indonesia Raya.

